

file : Soedjatmoko : Pedoto
2 Mei 1967 . P. 412/11/D 2-1/67 .

MENTJARI POLITIK KEBUDAJAAN

Unesco pegang peranan
oleh

Soedjatmoko.

Bagaimana suatu negara harus merumuskan politik kebudajaannya ? Unsur2 apa jang harus diliputi oleh politik kebudayaan itu? Tindakan2 mana jang dapat disebut suatu keaktifan kebudayaan?
Pertanyaan2 inilah jang mendjadi pokok pembitjaraan pada suatu pertemuan ahli2 kebudayaan dengan secretariat Unesco bagian kebudayaan jang diadakan pada bulan April jang baru lalu.

Pada Konperensi Umum Unesco tahun 1966 beberapa negara telah meminta kepada Direktur Djenderal setjara bagaimana harus ditentukan suatu politik kebudayaan (disamping suatu politik pendidikan dan politik perkembangan ilmu pengetahuan); apa konsepsinja dan bagaimana metodiknja. Telah diambil keputusan supaja Direktur Djenderal pada Konperensi Umum pada tahun 1968, akan memadjukan rekomendasinja mengenai persoalan ini.

Dalam hubungan ini maka oleh sekretariat disusun suatu rentjana sementara untuk mengadakan suatu survey kebudayaan. Rentjana ini telah diadjukan kepada suatu panel ketjil jang terdiri dari beberapa orang jang dianggap ahli kebudayaan dan jang diminta pendapatnja tentang rentjana sementara ini dalam kapasitas pribadinja. Didalam panitya ketjil ini dimana hadir ahli masing2 dari Inggris, Tsjeko, Perantjis, Peru, Uni Soviet dan saja dari Indonesia djuga duduk wakil2 dari Dewan International Music, Uni International Arsitek, Dewan International Museum dan Institut International Theater.

Rentjana Secretariat berbentuk suatu rantjangan survey tentang kebidjaksanaan kebudayaan jang telah diambil di beberapa negara. Maksudnja bahwa hasil2 survey itu didjadikan bahan bagi sekretariat untuk merumuskan pikiran2nja jang nanti dibahas oleh suatu panitya ahli 22 negara pada akhir tahun ini.

Djasanja rentjana survey ini ialah bahwa disitu diperintji unsur2 jang harus diliputi oleh suatu politik kebudayaan. Hal infrastruktur, administratif dan keuangan; perkembangan dan kebutuhan2 kebudayaan; hubungan antara sektor kebudayaan dengan sektor ekonomi dan teknologi, lembaga2 untuk keaktifan kebudayaan, faktor manusia, jaitu para artist, para budajawan serta peranannja, dan training pendidikan artistik.

Akan tetapi dalam pembitjaraan pertama sudah mendjadi terang bahwa tidak ada suatu resep umum untuk menjusun politik kebudayaan sebab keperluan masing2 negara memang berlainan, bahkan dapat dikatakan bahwa suatu politik kebudayaan tidak dapat ditentukan lepas daripada tujuan2 pokok sesuatu masjarakat, Berdasarkan tujuan2 pokok itu, maka harus diadakan pilihan2 fundamentil mengenai poolitik kebudayaan. Maka jang dapat dikerdjakan oleh Unesco pada hakekatnja tidak lain daripada memperintji unsur2 jang harus diliputi oleh suatu politik kebudayaan serta membeberkan alternatif2 kebidjaksanaan mengenai unsur2 tadi dengan segala implicatienja, sehingga masing2 negara dapat menentukan pilihannja sendiri dari sudut tujuan2 nasionalnja.

Didalam diskusi itu djuga tjepat mendjadi njata bahwa pada umumnja survey itu terlampau statis, tak mampu untuk menangkap perkembangan dan perobahan2 jang sedang mendjadi. Djuga dikemukakan bahwa bagi negara2 baru angka2 statistis jang diminta itu dalam banjak hal irrelevant oleh sebab angka2 itu tidak mentjerminkan selera publik melainkan sering ditentukan oleh faktor2 diluar bidang kebudayaan.

Djuga tampak perbedaan besar antara problematik bagi negara2 jang ekonomi sudah madju dan negara2 baru. Tapi disini Unesco terbentur pada suatu kesulitan jang timbul dari garis pokoknja sendiri. Sebenarnja kedua golongan negara ini harus dihadapi sendiri2 dalam menelaah problematiknya itu, akan tetapi Unesco sedjak dia berdiri memegang teguh pada anggapan bahwa bidang kebudayaan ialah bidang satu2nja didunia ini dimana materinja tidak dapat dibeda2kan antara negara2 jang lebih madju ekonominja dan negara2 jang sedang berkembang.
Hasil2 kebudayaan semua negara mempunyai nilai intrinsik jang sama bagi seluruh umat manusia. Berlainan dengan bidang2 politik, ekonomi dan sosial misalnja. Maka sulitlah bagi Unesco untuk membagi rantjananja itu dalam dua bagian dan untuk menjesunikan bagian masing2 dengan realitas problematiknya.

Negara2 jang sudah "settled" menghadapi persoalan2 jang timbul dari peningkatan tingkat hidup ekonomisnja, jaitu perubahan didalam pola keaktifan kebudayaan, soal menggunakan waktu luang jang lebih besar, effekt daripada perkembangan dibidang teknologi atas pentjiptaan serta penjebaran hasil2 artistik. Untuk itu perlu ditjari data statistisnja jang dapat mentjerminkan trends daripada perkembangan kebudayaan serta perubahan didalam selera masyarakat.

Lain sama sekali problematik bagi negara2 baru. Persoalan disini bukan sadja penjebaran hasil2 kebudayaan jang sudah ada, meskipun hal itu penting sekali untuk menjjamin partisipasi rakyat sebanjak2nja, tapi disamping itu sangat diperlukan untuk menghadapi persoalan merangsang kreativitas.

Tidak dapat disangkal bahwa didalam negara2 baru dengan masyarakat peralihannya soal kreativitas artistik mendjadi persoalan jang besar berhubung dengan adanya discontinuitas dan desorientasi didalam beberapa bidang kebudayaan, disertai dengan pentjetusan kreativitas baru dibeberapa bidang kebudayaan lainnya.

Namun persoalan pokok jang membedakan problematik kebudayaan bagi negara2 baru dan negara2 jang sudah "settled" ialah bahwa suntu politik kebudayaan bagi negara2 baru tidak dapat membatasi diri pada segi daya tipta artistik serta peniebaran dan preservatie, penguatan, karya2 artistik melainkan harus juga meliputi dua bidang lain jang penting, jaitu nationbuilding dan modernisasi.

Suntu politik kebudayaan negara2 baru mempunyai fungsi penting didalam usaha nation building, jaitu khususnja dalam membawa kebudayaan golongan2 minoritas dan suku2 bangsa kedalam arus abad ke duapuluh, dan untuk mengintegrasikan kebudayaan2 itu kedalam suatu kebudayaan nasional.

Disamping itu diperlukan juga suntu politik kebudayaan jang dapat digunakan sebagai alat, instrument, bagi process modernisasi. Seperti diketahui modernisasi ialah process perubahan dibidang teknologi, susunan masyarakat, alam pikiran dan adat kebiasaan serta kebudayaan jang memungkinkan suatu masyarakat tradisional-agraris mendjadi suatu masyarakat modern jang sanggup untuk menghadapi tantangan2 abad ke-20 serta memanfaatkan kemungkinan2 zaman modern ini.

Suntu politik kebudayaan harus dapat merangsang dan memperkembangkan potensi latent jang ada pada rakyat negara2 baru ini kearah modernisasi.

Maka dari itu suntu politik kebudayaan harus menghadapi sistim nilai2 jang mendjadi landasan serta pengikat suatu masyarakat, dan jang mempengaruhi formasi personalitas atau kepribadian anggota2 masyarakat itu. Demikianlah dapat dirangsang kemampuan "innovational" serta "achievement orientation" dengan membung ikatan kepada tradisi2 jang sudah lapuk serta "status orientation" jang melekat kepada anggota2 masyarakat tradisional.

Didalam diskusi tentang hal ini dikemukakan juga kesempatan2 dan kemungkinan2 jang terbuka bagi negara2 baru untuk bereksperiment, dan untuk mewujudkan infrastruktur kebudayaan jang paling sesuai dengan keperluan2 negara2 itu masing2.

"Djanganlah suatu bangsa mendjiplak sadja lembaga2 kebudayaan dari negara2 lain. Djanganlah suatu bangsa dikuasai oleh masa lampunya sendiri. Lebih2 lagi, djanganlah bangsa itu dikuasai oleh masa lampau bangsa lain".

Adanja alat2 mass media modern seperti Radio, TV dan film sudah barang tentu membuka berbagai kesempatan baru untuk suntu perkembangan pesat dibidang kebudayaan bagi negara2 baru, akan tetapi sebaliknya alat2 mass media ini juga memerlukan garis2 kbidjaksanaan khusus agar supaja bematjam2 kebudayaan daerah djangan sampai tertjekek atau terdesak oleh kebudayaan2 jang dapat menggunakan mass media ini.

Diskusi panel ahli2 ini meliputi suntu bidang jang luas sekali. Dari persoalan hari depan orkes2 besar sampai kepada perkembangan musik elektronik, sampai tjara2 merangsang pentjiptaan karya2 baru didalam bidang musik tradisional di Asia dan Afrika. Dari matjamnja gedung concert dan theater jang paling sesuai dengan perkembangan2 kota2 modern, sampai fungsi theater dan museum sebagai pusat dan perangsang didalam penjebaran kebudayaan kedaerah2, sampai pentjaharian lembaga2 jang paling tepat untuk merangsang kebudayaan didaerah pedesaan di Asia dan Afrika. Akan tetapi para pendebat terdiam juga waktu disentuh oleh Gio Ponti, President Uni International Arsitek, seorang jang sudah landjut sekali usianya. Berkata Ponti: "Djanganlah kita semuanya lupa bahwa sampai sekarang manusia belum tahu setjara bagaimana membikin suatu artist. Process kreatif masih tetap merupakan suntu misteri jang besar bagi manusia. Hanja Tuhanlah jang mengetahuinja, dan hanja Tuhanlah jang dapat mentjiptakan seorang artist. Saja peringatkan saudara2 kepada kota2 Picasso: "Saja tidak mentjari; saja menemukan. Maka hendaknya kita semuanya menghadapi persoalan politik kebudayaan ini dengan kerendahan hati seperlunya".

Djakarta 2 Mei 1967.